PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI

Tri Wahyu Pranoto^{1*}, Markoni², I Made Kanthika³, Joko Widarto⁴

^{1,2,3,4}Program Magister Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

¹triwahyu@student.esaunggul.ac.id, ²markoni@esaunggul.ac.id, ³kanthika@esaunggul.ac.id,

⁴joko.widarto@esaunggul.ac.id

*Corresponding author: triwahyu@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM. Salah satu putusan terkait kejahatan skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Nasabah menderita kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi melalui modus Skimming ATM dan perlindungan hukum nasabah perbankan yang menjadi korban skimming kartu ATM. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan skimming ATM termasuk dalam tindak Pidana Illegal access yang diatur dalam UU ITE secara khusus dalam Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Disyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Adapun perlindungan hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, skimming ATM, Perlindungan hukum data pribadi.

Abstract

Personal data is a valuable asset owned by the personal data subject. Personal data protection is closely related to the protection of a person's property, dignity, and character. One of the crimes of leaking personal data in the banking sector is carried out through the ATM skimming mode. One of the decisions related to the ATM skimming crime is Decision No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, a crime committed by a foreign national residing in Indonesia. The customer suffered material losses due to this act. This research aims to analyse the criminal liability of the perpetrators of the crime of leaking personal data through the ATM skimming mode and the legal protection of banking customers who are victims of ATM card skimming. The research method is conducted in normative juridical manner with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study found that ATM skimming is included in the criminal act of Illegal access which is regulated in the ITE Law specifically in Article 30 paragraph 2 jo Article 46 Paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning ITE Jo Article 55 Paragraph (1) Ke-1 KUHP. It is required that there is the ability to be responsible, guilt, and the absence of justification or excuse for criminal acts committed by the defendant to be held criminally responsible. The legal protection of banking customers' personal data is regulated in the Banking Law, Consumer Protection Law, ITE Law, Personal Data Protection Law, BI Regulation No.3 of 2023 and OJK Regulation No.22 of 2023. Legal protection is provided preventively and repressively. Preventive legal protection is the granting of rights and the imposition of obligations contained in state administrative and civil juridical instruments. Repressive legal protection is the imposition of punishment for criminal acts committed by criminals.

Keywords: Criminal liability, ATM skimming, legal protection of personal data.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan turut meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi keuangan. Namun hal tersebut diikuti juga dengan munculnya kejahatan baru salah satu diantaranya adalah kejahatan skimming ATM.

Skimming adalah teknik dimana perangkat perekam informasi (skimmer) dipasang pada mesin ATM untuk mencuri data dari kartu ATM yang digunakan. Informasi yang direkam dapat mencakup nomor kartu dan PIN. Kejahatan skimming dapat menyebabkan pencurian identitas dan penyalahgunaan rekening bank. Skimming dalam dunia perbankan menjadi salah satu seni kejahatan yang tujuannya untuk meretas dan membobol kartu debit atau kartu rekening milik nasabah bank tersebut guna mendapatkan informasi pribadi dalam rekening tersebut dengan cara mengakses melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan melancarkan aksinya. Sebagaimana halnya disampaikan oleh Elisatris Gultom dikutip dari bukunya yang berjudul “Cyber Law Hukum Teknologi Informasi” yang dipresensikan oleh Surya Ari Wibowo dalam jurnal nya: Skimming adalah tindak kejahatan dalam kategori jenis pencurian dengan cara mengakses mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menggandakan berbagai data dan penjelasan yang tertera pada strip magnetic kartu ATM tersebut dengan cara illegal, pengertian strip magnetik itu sendiri ialah baret hitam yang terletak pada posisi belakang kartu kredit atau debit yang kegunaannya semacam pita kaset atau material feromagnetik yang digunakan sebagai pencadangan seluruh data dan informasi milik nasabah

Tindak kejahatan skimming adalah kejahatan yang mencuri informasi nasabah yang ada dalam magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM. Maka dapat disimpulkan bahwa skimming adalah suatu kejahatan magnetic stripe yang ada pada kartu ATM dengan illegal untuk memiliki kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut dengan cara menggandakan kartu ATM ataupun dengan memasang hidden camera untuk mengetahui PIN ATM nasabah atau korban.

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran

Kasus skimming ATM menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, namun juga berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi. Bank sebagai pihak yang mengelola dan menyimpan data nasabah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan tersebut. Prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), khususnya pada Pasal 40 yang mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kejahatan skimming ATM menjadi isu yang krusial karena melibatkan dua aspek penting yaitu perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab perbankan dalam mengamankan data tersebut. Pelanggaran kerahasiaan data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah, baik secara material maupun reputasi. Sementara itu, Perbankan memiliki kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data nasabah pribadi dari kejahatan skimming ATM.

Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menangkap sebanyak 45 pelaku kejahatan skimming di Pulau Dewata. Sebanyak 45 pelaku ini terdiri dari 22 kasus yang berhasil diungkap sejak 2018. Terdiri dari 22 kasus itu diungkap pada 2018 sebanyak dua kasus, 2019 diungkap lima kasus, 2020 ada 13 kasus, dan 2021 ada 2 kasus.

Kemudian 45 orang pelaku tersebut terdiri dari warga negara (WN) Bulgaria 19 orang, WN Rumania 12 orang, WN Polandia 2 orang, WN Filipina 2 orang, WN Ukraina 1 orang, WN Turki 1 orang, dan 8 orang WNI.

Salah satu putusan atas tindak pidana skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps yang menjerat Warga negara Turki pada tahun 2021. Adapun kasus posisi diuraikan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Perbuatan terdakwa dalam peristiwa Skimming ini diawali dengan adanya laporan nasabah kepada Pihak Bank BNI yang melaporkan adanya transaksi mencurigakan yang berakibat saldo rekeningnya berkurang. Lebih lanjut Bank Pihak Bank BNI juga mendapat laporan atas adanya alat mencurigakan yang dipasang pada ATM milik Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN yang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna No.37A Renon, Denpasar, Warung Bendega. Lebih lanjut Saksi I Nengah Ariyasa dan Saksi Wawan Setiawan yaitu Pihak Bank BNI langsung melakukan pengecekan pada lokasi tersebut dan mendapatkan bahwa benar telah terpasang alat skimmer. Pihak BNI melakukan pengecekan rekaman CCTV dan ada pihak yang diduga melakukan pemasangan alat skimmer ATM. Pihak Bank BNI lebih lanjut berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut. Pihak Kepolisian Polda Bali melakukan pemantauan dan penyelidikan guna untuk menemukan pelaku. Dari Pantauan rekaman CCTV menunjukkan terdakwa melepas perangkat deep insert skimmer. Petugas polisi yang mengawasinya segera menangkap pelaku. Selama pengeledahan tubuh pelaku, ditemukan perangkat deep insert skimmer di dalam saku baju sebelah kiri terdakwa, serta sejumlah kartu magnetic stripe yang diduga mengandung data kartu perbankan milik orang lain.

Terhadap perbuatan pidana tersebut pihak kepolisian melakukan kegiatan tangkap tangan. Berdasarkan uraian fakta dalam persidangan yang termuat dalam putusan dalam kasus tersebut terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian.

Dalam putusan 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps. menetapkan terdakwa Cezmi yamac baik secara individu maupun bersama Saksi Osman Ozperk (diajukan untuk penuntutan terpisah) diajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan menjadi Pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana Illegal access atas ATM nasabah. Disimpulkan dalam kasus ini subjek hukum yang dimintai pertanggungjaaban adalah perseorangan Warga Negara Asing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi dengan modus Skimming ATM dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang menjadi korban skimming ATM ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan membocorkan data pribadi dengan modus skimming ATM

a. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kejahatan *Skimming* ATM

Hakikat pertanggungjawaban pidana merujuk pemahaman pada suatu subjek hukum (pihak sebagai addresat norm) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Mengkaji suatu perbuatan pidana diperlukan pemahaman atas definisi konsep atas uraian suatu perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal dengan istilah strafbaar feit yang berasal dari bahasa belanda yang

memiliki arti delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut dibebankan pada subjek hukum yakni perseorangan yang memenuhi dengan rumusan yang tercantum dalam pasal Undang Undang yang berkaitan dengan pembocoran data pribadi. pembocoran data pribadi dengan modus operandi Skimming ATM merupakan perbuatan Illegal access yang melanggar Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Tindak pidana akses ilegal adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP meliputi :

✓ Unsur setiap orang

Merujuk pada subjek hukum dalam hal kasus ini adalah perseorangan Warga Negara Asing yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan sehat secara Rohani dan jasmani, mampu menentukan kehendak serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan. Unsur setiap orang termasuk dalam unsur subjektif yang ditujukan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.

✓ Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Memiliki makna perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan secara tertulis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu adanya unsur kesengajaan secara sadar dari terdakwa atas perbuatan Skimming atm yang dilakukan serta terdakwa tidak memiliki hak. Hal tersebut terbukti dalam fakta persidangan keterangan saksi pihak bank BNI yang tidak ada ijin pemasangan skimmer kepada terdakwa. Unsur dengan sengaja atau disebut juga dengan dolus termasuk dalam unsur subjektif yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Sedangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum termasuk dalam unsur objektif.

✓ Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan alat bukti dalam persidangan ,dan berdasarkan rekaman CCTV terdakwa melakukan pelepasan alat deep skimmer pada ATM serta terdakwa mengakui melakukan pemasangan deep skimmer dan kamera tersembunyi untuk merekam PIN nasabah pada mesin ATM yang kemudian menyalin alat deep skimmer ke kartu lain dengan menggunakan laptop melalui encode card writer .Selanjutnya terdakwa melakukan transaksi menggunakan kartu ATM yang telah digandakan dan PIN yang berhasil direkam. Unsur mengakses sistem elektronik dan memperoleh informasi elektronik terpenuhi dan terbukti dalam

persidangan. Unsur ini termasuk dalam unsur objektif yaitu perbuatan yang dilakukan yang dilarang oleh Undang-undang.

- ✓ Unsur mereka yang melakukan dan turut serta melakukan.
Melakukan perbuatan mengakses sistem komputer Tanpa mendapatkan izin dari Bank BNI, terdakwa dan saksi OSMAN OZPERK menggunakan sistem komputer untuk mendapatkan informasi dan dokumen elektronik, khususnya dari ATM Bank BNI. Terdakwa dan Saksi OSMAN OZPERK tiba pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dengan sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam DK 2538 ACJ. Terdakwa masuk ke ATM Bank BNI, sedangkan Saksi OSMAN OZPERK menunggu di sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar. Saat dilakukan pengankapan pada Saksi OSMAN OZPERK, terdakwa lari dengan alasan takut terlibat tindak pidana. Namun hal tersebut bertentangan dengan kesaksian terdakwa dan saksi OSMAN OZPERK. seharusnya Ia tidak perlu melarikan diri, karena tindakan itu menunjukkan bahwa ia terlibat dan bersalah bersama terdakwa.

Pelaku Kejahatan terbukti turut serta tidak memiliki hak dan dengan sengaja dan melanggar hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan yang termuat dalam putusan. Keterangan saksi Pegawai Bank BNI I Nengah Ariyasa, Pihak BNI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa terdakwa dan Saksi OSMAN OZPERK untuk melakukan pemasangan alat Skimming berupa deep insert skimmer dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian cover PIN ATM pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN. Unsur turut serta melakukan termasuk dalam (medpleger) yaitu melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana tersebut.

Menurut pendapat penulis, dari putusan yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana melalui proses penegakan hukum telah melaksanakan fungsinya yaitu memberikan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki oleh individu. Perbuatan Ilegal Akses dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan diatur dalam pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 UU ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP . Pasal tersebut menjadi dasar legalitas dari penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Tindak Pidana Illegal akses melalui modus Skimming ATM termasuk dalam kategori Tindak Pidana khusus dalam bidang ITE dan merupakan Delik Commisionis (Larangan untuk berbuat sesuatu yang diatur dalam UU) yang dilakukan secara sengaja (opzet). Adapun Mensrea terpenuhi dengan adanya niat dari subjek hukum turut serta melakukan Skimming kartu ATM yang membuktikan adanya kesalahan (schuld) dari perbuatan terdakwa. Actus reus juga terpenuhi yakni dengan adanya hasil yang didapatkan data kartu ATM yang di salin melalui alat deep skimmer serta data PIN nasabah yang direkam melalui kamera tersembunyi yang dipasang pada cover ATM.

Dalam putusan tersebut jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau pasal Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tepat dan sesuai dengan perbuatan pidana yang terungkap dalam persidangan dan hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan pasal Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) U ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penulis sependapat dengan pasal yang digunakan jaksa

dalam dakwaan maupun pasal yang dipilih hakim dalam memutus perkara ini. Dalam tindak pidana illegal access melalui modus Skimming tidak perlu di juncto kan dengan pasal 362 tentang Pencurian pada KUHP. Penerapan pasal UU ITE merupakan penerapan dari asas lex generalis derogat legi generali dari KUHP.

Dalam putusan kasus ini, terhadap Subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan sudah bersesuaian dengan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban Pidana mensyaratkan adanya :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dengan syarat keadaan jiwanya sehat dan mampu menginsyafi kehendak atas tindakan tercela yang dilakukan. Dalam kasus Skimming ATM tersebut dalam proses penegakan hukum pidana , terdakwa dinilai dalam kondisi jiwa yang sehat.
- 2) Adanya kesalahan secara sengaja atas Perbuatan Pidana yang dapat dimintakan Pertanggungjawaban Pidana. Dalam kasus Skimming ATM tersebut dalam proses penegakan hukum pidana, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Terdakwa dengan sengaja sebagai niat memasang deep skimmer untuk menyalin data kartu ATM dan kamera tersembunyi untuk merekam PIN ATM nasabah. Hal tersebut sesuai dengan teori kehendak bahwa kehendak terdakwa sengaja melakukan perbuatan Skimming ATM dengan tujuan memperoleh data yang kemudian disalin pada ATM lain menggunakan laptop dan encode card writer dan digunakan untuk mengambil uang pada rekening ATM nasabah perbankan.
- 3) Serta tidak adanya alasan Pembenaar atau Alasan Pemaaf atas perbuatan Pidana yang dilakukan. Dalam kasus Skimming ATM tersebut, dalam proses penegakan hukumnya tidak ditemukan adanya Alasan pembenaar yaitu tidak ditemukannya keadaan darurat, perbuatan yang dilakukan tidak karena pembelaan terpaksa, dan tidak karena menjalankan undang-undang ataupun perintah jabatan. Tidak adanya alasan pemaaf yaitu tidak ditemukannya kondisi jiwa yang sakit, tidak adanya pembreaan darurat yang diakibatkan guncangan jiwa yang hebat karena ancaman.

Dalam kasus Skimming yang dibahas, Pelaku sebagai penyerta pelaku tindak pidana (delneming) termasuk dalam kategori Medplegen yaitu yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan. Terbukti pelaku membantu Terdakwa dan Saksi OSMAN OZPERK tiba pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dengan sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam DK 2538 ACJ. Terdakwa masuk ke ATM Bank BNI, sedangkan Saksi OSMAN OZPERK menunggu di sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar. Saat dilakukan pengankapan pada Saksi OSMAN OZPERK, terdakwa lari dengan alasan takut terlibat tindak pidana. Namun hal tersebut bertentangan dengan kesaksian terdakwa dan saksi OSMAN OZPERK. Seharusnya. Dia tidak perlu melarikan diri, karena tindakan itu menunjukkan bahwa ia terlibat dan bersalah bersama terdakwa.

- 2) **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang menjadi Korban Skimming ATM Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Putusan No. 916 K/PID.SUS/2021/PN.Dps)**
 - a. **Perlindungan hukum dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pihak nasabah sebagai subjek data pribadi maupun perbankan sebagai pengelola dna prosesor data priadi**

Perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan yang dibentuk untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan sangat berkaitan dengan data yang dimiliki oleh nasabah, sehubungan

dengan hal tersebut perlindungan data pribadi menjadi bagian yang terpenting. Dalam praktiknya, kejahatan terhadap data pribadi nasabah dapat dilakukan baik oleh pegawai perbankan maupun orang diluar pegawai perbankan. Skimming ATM adalah salah satu bentuk kejahatan cyber dalam sektor perbankan terhadap data pribadi.

Teknik Skimming adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu ATM/debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku dapat mengakses data korban secara illegal.

Nasabah perbankan dalam konteks perlindungan data pribadi merupakan subjek data yang melekat pada dirinya data pribadi yang wajib dilindungi. Data pribadi secara umum dibagi menjadi dua yaitu data bersifat umum dan data yang bersifat spesifik. Lebih lanjut dalam penjelasan UU Pelindungan Data Pribadi yang mengkategorikan data spesifik diantaranya adalah data keuangan pribadi yang dimaknai data keuangan pribadi adalah termasuk namun tidak terbatas pada data simpan pinjam pada bank termasuk tabungan, deposito dan data kartu kredit. Frasa termasuk namun tidak terbatas dipahami tidak hanya hal yang disebutkan dalam penjelasan, namun ada hal lain yang berkaitan yg dapat dikategorikan dalam penjelasan tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PIN ATM dan Data Kartu ATM Nasabah perbankan merupakan Data Pribadi yang bersifat spesifik termasuk dalam kategori data keuangan pribadi yang wajib dilindungi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjadi dasar legalitas untuk melindungi data tersebut. Merujuk pada ketentuan umum pasal 1 ayat 28 menjelaskan bahwa Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Hal tersebut dipahami termasuk didalamnya dalam data diri nasabah perbankan. Pemahaman mengenai rahasia bank mencakup pengakuan bahwa tidak seluruh aspek yang ditangani atau diatur oleh bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Rahasia bank lebih khusus merujuk pada informasi-informasi yang bersifat pribadi dan sensitif mengenai nasabah dan transaksi keuangan mereka. Identitas nasabah termasuk Informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas, dan informasi pribadi lainnya, dianggap sebagai informasi rahasia yang harus dijaga oleh bank. Keadaan keuangan, termasuk didalamnya tentang informasi data keuangan pribadi nasabah, seperti saldo rekening, riwayat transaksi, rincian transaksi, history kredit dan informasi keuangan lainnya, juga termasuk dalam rahasia bank.

Dalam tinjauan perlindungan konsumen, bank adalah individu yang menggunakan layanan bank, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 16 undang-undang Perbankan. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidak hanya seperti hubungan kontraktual biasa, melainkan suatu hubungan yang terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak manapun kecuali jika ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dasar dalam hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan perdata dengan asas kepercayaan. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, menentukan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.

Nasabah perbankan yang menjadi korban skimming ATM mengalami kerugian materiil. Tanggung jawab perbankan terhadap nasabah yang menjadi korban Skimming diatur dalam berbagai peraturan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 7 huruf f dan g UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap penyelenggara usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian materiil akibat produk atau jasa yang disediakan

Perlindungan hukum merupakan bentuk kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya melalui otoritas kekuasaan yang dimiliki. Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pemberian hak kepada Subjek Hukum. Hak secara hakikat dapat dipahami sebagai kebebasan dalam memilih dari Subjek Hukum apakah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu bahkan mengizinkan sesuatu atau tidak mengizinkan sesuatu terhadap objek yang dikuasai oleh Subjek Hukum. Dalam praktik pelaksanaan hukum akan melahirkan peristiwa hukum yang kemudian menimbulkan Hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak (Subjek Hukum) atas norma yang disepakati maupun norma yang ditetapkan oleh Negara dalam bentuk Instrumen Hukum.

Terdapat enam norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam perlindungan hukum data pribadi nasabah yaitu:

1) UU Perlindungan konsumen

ATM dipahami sebagai produk dari perbankan yang ditawarkan kepada nasabah yang juga memiliki celah atas kejahatan yang berpotensi merugikan nasabah. Dalam pasal 4 huruf c tentang hak konsumen menjelaskan bahwa konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalm produk ATM nasabah juga berhak mendapatkan jaminan atas resiko adanya Skimming ATM.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini nasabah merupakan konsumen yang memakai jasa dari perbankan tersbut.

2) UU Perbankan

Produk perbankan berupa ATM memiliki potensi risiko keamanan, seperti Skimming ATM. Bank sebagai penyelenggara ATM wajib bertanggung jawab untuk melindungi nasabahnya dari risiko Skimming ATM.

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabahnya. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam melindungi privasi dan kerahasiaan data nasabah. perlindungan privasi nasabah tidak hanya sebatas data keuangan mereka, tetapi juga melibatkan data pribadi yang bersifat identifikasi dan informasi lainnya yang terkait dengan nasabah.

Pasal 47 ayat (2) undang-undang perbankan menyebutkan pihak-pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank. Berikut adalah daftar pihak-pihak tersebut adalah anggota dewan komisaris, sebagai bagian dari badan pengawas bank, memiliki kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank. Anggota direksi, yang bertanggung

jawab atas kebijakan dan pengelolaan operasional bank, juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi bank. Pegawai bank, yang termasuk dalam kategori petugas atau karyawan bank, memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan informasi yang mereka ketahui dalam konteks pekerjaan mereka. Pihak terafiliasi lainnya dari bank, yang mungkin mencakup entitas atau individu yang memiliki keterkaitan bisnis atau kepemilikan dengan bank, juga diwajibkan untuk menjaga rahasia bank. Pihak-pihak di atas memiliki akses dan tanggung jawab tertentu terhadap informasi bank, dan oleh karena itu, diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, khususnya terkait dengan data pribadi nasabah.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan "nasabah" adalah individu yang menggunakan layanan bank, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 16 undang-undang tersebut. Dalam hal ini, pihak nasabah sangat penting; kehidupan dunia perbankan bergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada masyarakat untuk mencegah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot. Perlindungan privasi nasabah mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bahwa keterangan mengenai nasabah penyimpan tidak termasuk dalam keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Bahkan, jika nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang juga berperan sebagai nasabah debitur, bank tetap diwajibkan untuk merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE terkait dengan data pribadi belum mengatur secara detail dan komprehensif. Terkait dengan pengaturan tersebut justru diatur secara komprehensif pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Secara yuridis perlindungan Data Pribadi yang wajib jika dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi Prinsip Pengelolaan, Ruang lingkup, persetujuan pemrosesan data pribadi, syarat ketentuan dan prosedur penghapusan data Pribadi.

Perlindungan data pribadi lebih terperinci dan komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam mengkaji Data Pribadi nasabah perbankan dalam perlu dikaji definisi secara umum dari Data Pribadi dalam UU ITE tersebut.

- a) Pasal 26 Menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, menghapus, atau membuat data elektronik atau dokumen elektronik.
- b) Pasal 27 Menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau fitnah.
- c) Pasal 29 Menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dijamin kerahasiaannya.

- d) Pasal 30 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 adalah salah satu pasal yang mengatur tindak pidana dalam hal akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik.

Adapun Perbuatan Pidana yang yang ditentukan dalam hal kejahatan data pribadi, Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melaanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal Access).

Adapaun Ancaman Pidana atas perbuatan illegal Access merujuk pada Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Adapun Perbuatan Pidana yang yang ditentukan dalam hal kejahatan data pribadi, Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melaanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal Access).

Adapaun ancaman pidana atas perbuatan illegal Access merujuk pada Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

- 4) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Disahkannya UU Pelindungan Data Pribadi No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi Aturan hukum secara spesifik sekaligus sebagai Payung Hukum yang mengatur secara Komprehensif terkait Pelindungan Data Pribadi yang sebelumnya masih tersebar diberapa Peraturan Perundang-undangan.

Sebelum disahkannya UU Pelindungan Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi merujuk pada UU No.11 Tahun 2008 Tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Elektronik.

Terdapat 10 Hak Subjek data Pribadi yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab IV dan dirumuskan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dalam kaitannya kejahatan skimming ATM dapat dipahami sebagai data pribadi yang dicuri/dibocorkan dengan modus mengcopy data kartu ATM nasabah. Pasal 12 ayat (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

POJK Nomor 22/PJOK/2013 memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk nasabah bank, dari berbagai risiko dan penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Pasal 3 POJK menetapkan bahwa PUJK dalam

menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen. Lebih lanjut dalam pasal 19 menjelaskan bahwa PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen. PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen. Adanya persetujuan (consent) ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan memastikan konsumen memahami tujuan pemrosesan data secara jelas .

Dalam POJK pasal 55 tersebut juga menegaskan PUJK wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK dengan membentuk fungsi/unit untuk perlindungan konsumen dan masyarakat.

- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2023, tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Tujuan Peraturan ini diantaranya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia.

Pasal 29 menegaskan bahwa ayat Penyelenggara dalam hal ini Perbankan wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Penyelenggara. Aset disini perlu dipahami termasuk juga pada data pribadi yang dikendalikan oleh penyelenggara (Perbankan). Dalam penjelasan ayat 29 disebutkan bahwa menjaga keamanan aset konsumen dimaksud diantaranya supaya terhindar dari kejahatan penipuan (scam). Lebih lanjut, terkait dengan implementasi prinsip pelidungan data dan informasi konsumen juga diatur dalam Peraturan BI ini. Selanjutnya dalam pasal 32 mengamanatkan Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi data Konsumen. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut penyelenggara memiliki fungsi/struktur organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan data dan/atau informasi data Konsumen, Sistem informasi dan ketahanan siber yang handal, serta adanya prosedur dan mekanisme yang ditetapkan untuk pelindungan data dan/atau informasi data konsumen.

Dalam norma yang ditetapkan dalam Peraturan BI ini juga menjamin ketika konsumen menderita kerugian dalam lingkup pelindungan data pribadi yang disebabkan oleh Struktur Penyelenggara dalam hal ini Perbankan dan pihak ketiga yang mewakili/bekerja untuk kepentingan Penyelenggara, konsumen berhak menerima ganti kerugian, pemulihan nama baik, dan/atau bentuk lainnya. Jaminan tersebut secara lengkap ditetapkan pada pasal 42. Setelah ditelaah dan dianalisa dapat dipahami bahwa secara prinsip dan konsep apa yang tertuang dalam Peraturan BI tersebut diadopsi oleh UU pelindungan data pribadi. Dengan adanya peraturan BI ini memperkuat adanya perlindungan data pribadi nasabah sebagai konsumen perbankan.

b. Perlindungan hukum data melalui instrumen hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara

Perlindungan hukum Data Pribadi didalam UU Pelindungan Data Pribadi, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan pada poin a secara prinsip sama. Dalam konteks Represif memberikan hak kepada Subjek Data untuk melakukan tiga jalur hukum atas pelanggaran, Perbuatan Melawan Hukum maupun kejahatan yang dideritanya akibat pemrosesan data Pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun yang memiliki dampak kerugian akibat Pemrosesan Data Pribadi

yang dimilikinya. Tiga Instrumen hukum tersebut meliputi instrumen Hukum Perdata, Instrumen Hukum Pidana Maupun Instrumen Hukum Administrasi Negara.

A. Perlindungan Hukum Pada Instrumen Hukum Perdata

Dalam Aspek hukum perdata dikenal adanya konsepsi hak kebendaan. Data Pribadi dapat dipersamakan sebagai benda/asset yang dimiliki oleh subjek data dan termasuk dalam hak kebendaan tidak berwujud. Data Pribadi menjadi bagian dari objek hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 500 KUH Perdata. Asas yang berkaitan dengan hukum kebendaan diantaranya adanya asas hukum yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*), hak kebendaan yang memberikan kewenangan pada subjek hukum sebagaimana hak-hak kebendaan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak kebendaan juga memiliki *droit de suite* artinya mengikuti bendanya dimana pun itu berada.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat 1 UU Pelindungan Data Pribadi No.27 tahun 2022 memberikan hak kepada Subjek Data untuk melakukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran dalam Pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terjadinya gugatan perdata mendasarkan adanya peristiwa hukum yang menimbulkan adanya hubungan hukum dan mengakibatkan wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum. Secara Konseptual bahwa Wanprestasi timbul akibat tidak terlaksananya atas perjanjian atau kontrak yang disepakati para pihak. Dalam konteks pelindungan data pribadi dalam hal Subjek data mengajukan gugatan atas pelanggaran dan mengajukan ganti rugi dengan dalil wanprestasi, perlu dilihat adanya hubungan hukum data para pihak dan wajib didasarkan adanya bukti perjanjian atau kontraktual dari para pihak. Secara Teknis dalam Pemrosesan data Pribadi diwajibkan adanya dasar (*Legal basis*) yang diantaranya berdasarkan persetujuan yang bersifat kontraktual oleh Subjek Data bersama Pengendali Data Pribadi. Didalamnya termuat beberapa ketentuan yang bersifat kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi Para Pihak.

Dalam Buku ke III KUHPperdata dikenal konsep Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan setiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perlu dikaji perbuatan tersebut dari logika sebab akibat atas perbuatan yang dilakukan baik perintah maupun larangan yang mengandung unsur kesalahan yang timbul dari hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban hukum menurut peraturan perundang-undangan.

Kompensasi atas Pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi dan prosedur pengenaan ganti rugi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Hal ini secara teori bahwa penggantian ganti rugi menurut Rosa Agustina terdapat beberapa tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan melalui gugatan berupa Ganti kerugian dalam bentuk uang dari akibat yang ditimbulkan, ganti kerugian dalam bentuk natura dan meminta dikembalikan dalam keadaan semula, Pernyataan secara tegas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan melakukan pelarangan dilakukannya perbuatan tertentu.

Hak untuk melakukan penuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran atas pemrosesan Data Pribadi dari Subjek data diberikan untuk memberikan keadilan Corective dengan berusaha mengganti atau memperbaiki kerugian yang diderita oleh Subjek Data, serta berusaha untuk memperbaiki memulihkan dengan keadaan semula

(Prinsip Restitutio In integrum). Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian material maupun kerugian nonmaterial/ Immaterial.

B. Perlindungan Hukum Pada Instrumen Hukum Administrasi Negara

Kerugian Immaterial dalam konteks Pelanggaran atas pemrosesan data pribadi dapat berupa gangguan (kurangnya suatu hak kenikmatan atas sesuatu yang dimiliki) serta penyalahgunaan hak atas Data Pribadi yang merugikan orang lain. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Aspek Hukum Administrasi dirumuskan dalam Bab VIII terkait Sanksi Administratif pada Pasal 57 yang mencakup 38 ayat yang merupakan perbuatan hukum yang wajib dijalankan oleh para Pihak yang berakibat dikenakannya sanksi administrasi. Terdapat 4 jenis Sanksi Administrasi dalam UU Pelindungan Data Pribadi yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan Pemrosesan Data, Penghapusan Data atau pemusnahan Data Pribadi dan/atau denda administratif sebesar maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran. Sanksi Administrasi dimaksud diberikan oleh Lembaga khusus yang dibentuk melalui Peraturan Presiden.

Sanksi administrasi secara hakikat diatur dan dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memaksa Subjek Hukum untuk menjalankan Kewajiban Hukum dan menjamin terpenuhinya Hak Subjek Hukum lainnya. Sanksi Administratif semestinya berisi tentang pemberian sanksi atas perbuatan-perbuatan administratif. Pejabat yang berwenang berhak memberikan sanksi administrasi secara berjenjang dari tahapan sanksi yang terendah sampai dengan sanksi yang tertinggi. Dimulai dari Peringatan tertulis sampai dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal pemberian peringatan tertulis, Pejabat yang berwenang wajib menginformasikan perbuatan apa yang dilanggar secara administratif, dan Perbuatan apa yang harus dilakukan oleh Pihak yang melanggar, batas waktu sampai dengan kapan perbuatan tersebut harus dijalankan serta apa akibatnya jika perintah tersebut tidak dijalankan.

Dalam Sanksi Administrasi yang ke dua dalam Pelindungan data Pribadi adalah penghentian sementara kegiatan Pemrosesan Data termasuk dalam kategori tindakan paksa pemerintah (bestur dwaang). Tindakan paksa pemerintah dilakukan oleh pihak/ Lembaga yang berwenang yang diajukan melalui permohonan oleh Pihak yang dirugikan atas Pelanggaran Hak yang tercantum dalam Pasal 57 UU Pelindungan Data Pribadi.

Dwangsom juga dikenal dalam sanksi Administratif pada Instrumen Hukum Pelindungan Data Pribadi sebesar maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran. Sanksi Administrasi dimaksud diberikan wewenang kepada Lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden.. Dalam hal penegakan hukum Administrasi perlu memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan Prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal UU Pelindungan Data Pribadi menentukan untuk tata cara penegakan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini Lembaga yang berwenang belum terbentuk dan tata cara penegakan sanksi administratif belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

C. Perlindungan Hukum Pada Instrumen Hukum Pidana

Perlindungan hukum Data Pribadi dalam Aspek Hukum Pidana termasuk dalam Perlindungan Hukum pada konteks Represif. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Pengaturan Aspek Hukum Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi Subjek data dari kerugian materiil maupun immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak lain dalam pemrosesan data Pribadi sesuai pada Pasal Pidana materiil yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Ditinjau dari Wilayah hukum dalam pemberlakuan hukum Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi menganut Konsep Ekstrateritorialitas. Dalam UU tersebut Subjek Hukum yang diatur dalam hal ini Setiap orang, Badan hukum, dan organisasi melakukan perbuatan hukum yang berada di Yurisdiksi Negara Republik Indonesia maupun diluar Yurisdiksi Negara republic Indonesia (Ekstra) yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indoneisa serta bagi Subjek Data Pribadi Warga Negara Indonesia diluar Yurisdiksi Negara Indonesia.

Delik Materiil dalam UU Pelindungan data Pribadi terdapat Empat rumusan pidana tentang perbuatan yang dilarang yang tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66. Dalam Pasal 65 terdapat 3 Perbuatan yang dilarang yaitu Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi (Pasal 65 ayat 1). Kemudian dalam Pasal 65 ayat 2 mengatur Dilarangnya setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Lebih lanjut Dalam Pasal 65 ayat 3 mengatur tentang dilarangnya perbuatan secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Dalam ketentuan Pasal 66 secara khusus diatur tentang dilarangnya membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terhadap perlindungan data pribadi dapat dimaknai terdapat tiga aspek dari hukum pidana yang dilindungi dalam Data Pribadi yaitu perlindungan nyawa, harta benda, serta kehormatan, harkat martabat seseorang. Aspek perlindungan terhadap nyawa, harta benda serta kehormatan, harkat martabat sudah tercermin dalam rumusan dan sanksi yang di rumuskan dalam UU pelindungan data pribadi.

Menurut pendapat penulis dengan adanya UU Pelindungan Data Pribadi, hal tersebut memberikan perlindungan hukum secara komprehensif dan menjadi payung hukum yang lebih kuat karena memiliki sanksi baik perdata, pidana, maupun administrasi Negara secara tegas dan jelas.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pembocoran data pribadi dengan modus operandi Skimming ATM dalam kasus No.916/Pid.Sus/2021/PN.Dps dibebankan kepada subjek hukum perseorangan yang yang memenuhi rumusan yang tercantum dalam pasal Undang Undang yang berkaitan dengan data pribadi. pembocoran data

pribadi dengan modus operandi Skimming ATM merupakan perbuatan Illegal access yang melanggar Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Tindak pidana akses ilegal adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pelaku kejahatan terbukti turut serta tidak memiliki hak dan dengan sengaja dan melanggar hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Pertanggungjawaban Pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggungjawab dengan syarat keadaan jiwanya sehat dan mampu menginsyafi kehendak atas tindakan tercela yang dilakukan. Adanya kesalahan secara sengaja atas Perbuatan Pidana yang dapat dimintakan Pertanggungjawaban Pidana, serta tidak adanya alasan Pembena atau Alasan Pemaaf atas perbuatan Pidana.

2) Perlindungan Hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

B. Saran

- 1) Hendaknya Perbankan perlu melakukan penguatan sistem perlindungan data pribadi nasabah, termasuk dalam menanggulangi kejahatan skimming ATM. Perlu adanya Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ATM oleh bank. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang cara mencegah terjadinya kejahatan ATM. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara menjaga keamanan kartu ATM, seperti tidak memasukkan PIN di ATM yang terlihat oleh orang lain, tidak menggunakan ATM yang rusak atau tidak terawat, dan segera mengganti kartu ATM jika terlihat ada tanda-tanda penyadapan.
- 2) Hendaknya Perlu segera disahkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan aturan turunan lainnya atas pengaturan lebih lanjut dari UU Pelindungan Data Pribadi (penguatan substansi hukum). Dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap data Pribadi mengenai petunjuk teknis tata cara ganti kerugian, tata cara transfer data pribadi, tata cara pelaksanaan pemrosesan data pribadi, pengaturan pejabat atau petugas data pribadi serta kelembagaan khusus beserta wewenangnya terkait penyelenggaraan pelindungan data pribadi sebagai bentuk penguatan aspek struktur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2010). *Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Mansur, D. M., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2009). *Bank dan Lembaga Bukan Bank Edisi 3*. Jakarta: Indeks.

- Detikcom. (2024, Maret 30). *45 Pelaku Skimming ditangkap di Bali sejak 2018, terbanyak WNI Bulgaria*. Diakses pada 30 Maret 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-5367622/45pelaku-Skimming-ditangkap-di-bali-sejak-2018-terbanyak-wn-bulgaria>
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peraturan Bank Indonesia. (2023). Peraturan BI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- Sihombing, J. (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT. Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua 11 atas Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang ITE.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Yulianti, Y. (2020). Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Widya Yuridika*, 3(2). <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>